

# PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MARGINAL DI PERKOTAAN

Ahmad Habibi Syahid

LAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

## Abstrak:

Pemberdayaan daerah marginal dalam mencapai hidup yang sejahtera membutuhkan perhatian khusus dari berbagai pihak, utamanya masyarakat setempat. Baik secara individu maupun kelompok, secara bersama-sama berusaha mencari apa yang harus dilakukan untuk dapat mencapai hal tersebut dan menjadikan masyarakat menjadi madani.

Secara fisik, kondisi masyarakat marginal telah dapat diketahui dengan mudah oleh orang-orang karena pengalaman dan dapat diketahui secara teoretis oleh para ahli di bidang tersebut. Dengan demikian tidak ada satu alasan pun yang dapat dibenarkan, kalau tidak ada perhatian pada daerah marginal oleh pihak-pihak di luar masyarakat marginal serta individu dari masyarakat marginal itu sendiri.

Namun, secara nonfisik perlu ada suatu perhatian dan motivasi terhadap kepedulian masyarakat sendiri pada lingkungannya, antara lain melalui bimbingan sosial dalam berbagai forum. Alternatif yang dapat ditawarkan untuk membangun kepedulian masyarakat satu sama lain serta keberperanan pihak lain yaitu melalui pemberdayaan. Pemberdayaan ini akan menjadikan masyarakat terlibat secara langsung dalam transformasi sosial.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Masyarakat, Marginal

## A. Prawacana

Pendidikan sejatinya menjadi sebuah aset bagi kemajuan suatu bangsa terutama bagi bangsa Indonesia. Setiap warga Indonesia diwajibkan mengikuti jenjang pendidikan, mulai dari jenjang pendidikan dini, dasar, menengah dan jenjang pendidikan tinggi. Kewajiban mengikuti jenjang pendidikan ini sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang dasar tahun 1945 pada pasal 31 ayat 1 dan ayat 2. Pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal 31 ayat 2 menjelaskan setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah menanggung biayanya.<sup>1</sup>

Di dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>2</sup> Wujud dari UU no 20 tahun 2003 adalah upaya masyarakat dalam mewujudkan pendidikan yang demokratis yang dibarengi dengan usaha secara sadar dan bebas dalam menentukan arah kedepan. Masyarakat dengan haknya memiliki kebebasan dalam menentukan arah merupakan bagian dari konsepsi demokrasi telepas apakah masyarakat tersebut merupakan bagian dari masyarakat transisi kota.

Pengabdian masyarakat pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat atau pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat memiliki konsep dasar dalam hal ini kaitannya dengan makna pembangunan. David C. Korten<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2 (Surabaya: Indah, 2009), 61.

<sup>2</sup> Undang-undang Republik Inonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.3

<sup>3</sup> Lebih lanjut David menjelaskan bahwa pembangunan selayaknya ditujukan untuk mencapai sebuah standar kehidupan ekonomi yang menjamin pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Hal ini menurutnya merupakan sebuah tahapan esensial dan fundamental menuju tercapainya tujuan

mendefinisikan kata pembangunan sebagai suatu upaya yang bertujuan untuk memberikan sumbangsih atau kontribusi pada aktualisasi potensi tertinggi kehidupan manusia.

Di bawah ini beberapa asumsi yang dapat digunakan dalam rangka mewujudkan semangat dalam pengabdian dan pemberdayaan masyarakat, antara lain sebagai berikut:

*Pertama*, pada intinya upaya-upaya pengembangan masyarakat dapat dilihat sebagai peletakan sebuah tatanan sosial di mana manusia secara adil dan terbuka dapat melakukan usahanya sebagai perwujudan atas kemampuan dan potensi yang dimilikinya sehingga kebutuhannya baik kebutuhan material atau kebutuhan spiritual dapat terpenuhi. Pengabdian dan pemberdayaan masyarakat, oleh karena itu tidak berwujud tawaran sebuah proyek usaha kepada masyarakat, akan tetapi sebuah pembenahan struktur sosial yang mengedepankan keadilan. Pengabdian dan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merencanakan dan menyiapkan suatu perubahan sosial yang berarti bagi peningkatan kualitas kehidupan manusia.

*Kedua*, pengembangan masyarakat tidak dilihat sebagai suatu proses pemberian dari pihak yang memiliki sesuatu kepada pihak yang tidak memiliki. Kerangka pemahaman ini akan mejerumuskan kepada usaha-usaha yang sekedar memberikan kesenangan sesaat dan bersifat tambal sulam. Misalnya, pemberian bantuan dana segar (*fresh money*) kepada masyarakat hanya akan mengakibatkan hilangnya kemandirian dalam masyarakat tersebut atau timbulnya ketergantungan. Akibat yang lebih buruk adalah tumbuhnya mental “meminta”.

*Ketiga*, pengabdian dan pemberdayaan masyarakat mesti dilihat sebagai sebuah proses pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya. Menurut Soedjatmoko, ada suatu proses yang sering kali dilupakan bahwa pembangunan adalah *social learning*. Oleh karena itu, pengabdian dan pemberdayaan masyarakat sesungguhnya merupakan sebuah proses

---

kesejahteraan manusia. Lihat David C. Korten, “Development as Human Enterprise”, *Community Management; Asian Experience and Perspectives*, Connecticut: Kumarian Press, 1987, hal. 17.

kolektif di mana kehidupan berkeluarga, bertetangga, dan bernegara tidak sekedar menyiapkan penyesuaian-penyesuaian terhadap perubahan sosial yang mereka alami, akan tetapi secara aktif mengarahkan perubahan tersebut pada terpenuhinya kebutuhan bersama.

*Keempat*, pengabdian dan pemberdayaan masyarakat, oleh karena itu tidak mungkin dilaksanakan tanpa keterlibatan secara penuh oleh masyarakat itu sendiri. Partisipasi bukan sekedar diartikan sebagai kehadiran mereka untuk mengikuti sesuatu kegiatan, melainkan dipahami sebagai kontribusi mereka dalam setiap tahapan yang mesti dilalui oleh suatu program kerja pemberdayaan masyarakat, terutama dalam tahapan perumusan kebutuhan yang mesti dipenuhi. Asumsinya, masyarakatlah yang paling tahu kebutuhan dan permasalahan yang mereka hadapi.

*Kelima*, pengabdian masyarakat selalu ditengarai dengan adanya pemberdayaan masyarakat sebagai suatu cara pengembangan masyarakat. Tidak mungkin rasanya tuntutan akan keterlibatan masyarakat dalam suatu program pembangunan tatkala masyarakat itu sendiri tidak memiliki daya ataupun bekal yang cukup. Oleh karena itu, mesti adanya mekanisme dan system untuk memberdayakan masyarakat. Masyarakat harus diberi suatu kepercayaan bahwa tanpa ada keterlibatan mereka secara penuh, perbaikan kualitas kehidupan mereka tidak akan membawa hasil yang berarti.

Masyarakat transisi kota merupakan bagian dari masyarakat Indonesia dan juga memiliki hak yang sama atas pendidikan. Asas demokrasi seharusnya menjadi tameng bagi masyarakat transisi kota untuk dapat bebas menerima hak-hak sebagai warga negara terutama dalam masalah pendidikan. Kecenderungan masyarakat transisi kota pada pola kehidupan yang sederhana menjadikan mereka masuk dalam kategori masyarakat *pinggiran*.

Pada dasarnya hak dan kewajiban pendidikan telah dijamin oleh undang-undang, akan tetapi secara faktual bisa dilihat bahwa pendidikan di Indonesia belum berjalan secara maksimal. Kehadiran lembaga LAKSITA sebagai suatu lembaga yang

berbgerak di bidang pendidikan menjadi angin segar bagi masyarakat transisi kota.<sup>4</sup> Rumah Belajar LAKSITA menghadirkan kegiatan pembelajaran berupa pemberdayaan masyarakat salah satunya pelatihan bagi para remaja putus sekolah berupa peningkatan *life skill education*. Dalam tulisan ini ingin berusaha mengupas secara kritis tentang pemberdayaan masyarakat transisi kota dalam bingkai demokrasi serta peran negara dalam memberdayakan masyarakat untuk tujuan mewujudkan kesejahteraan sosial.

## B. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial

### 1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah terjemahan dari *empowerment*, sedang memberdayakan adalah terjemahan dari *empower*. Menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionary dalam Mardi Yatmo Hutomo (2000: 1), kata *empower* mengandung dua pengertian, yaitu:

- a. *to give power* atau *authority to* atau member kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain;
- b. *to give ability to* atau *enable* atau usaha untuk member kemampuan atau keperdayaan.

Terdapat 4 konsep pemberdayaan ekonomi menurut Sumodiningrat (1999) seperti yang dikutip oleh Mardi Yatmo Utomo (2000: 6), secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri.

---

<sup>4</sup> Dalam tulisan ini yang dijadikan studi kasus adalah keberadaan Rumah Belajar LAKSITA dan masyarakat transisi kota Ling. Tegal Jeruk Kec. Cipocok Kota Serang Prov. Banten.

- b. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala structural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktur.
- c. Perubahan structural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi: a) pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya; b) penguatan kelembagaan; c) penguasaan teknologi; dan d) pemberdayaan sumberdaya manusia.
- d. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulant, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.
- e. Kebijakannya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah: a) pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada asset produksi (khususnya modal); b) memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekedar *price taker*; c) pelayanan pendidikan dan kesehatan; d) penguatan industri kecil; e) mendorong munculnya wirausaha baru; dan f) pemerataan spasial.
- f. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup; a) peningkatan akses bantuan modal usaha; b) peningkatan akses pengembangan SDM; dan c) peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.

Menurut Ginandjar Kartasasmita (1996), pemberdayaan ekonomi rakyat adalah “Upaya yang merupakan pengalokasian sumber daya untuk mengembangkan potensi

ekonomi rakyat untuk meningkatkan produktivitas rakyat, sehingga baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat, dapat ditingkatkan produktivitasnya". Dari berbagai pandangan mengenai konsep pemberdayaan, maka dapat disimpulkan, bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya.

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris "*empowerment*" yang biasa diartikan sebagai pemberkuasaan. Dalam arti pemberian atau peningkatan "kekuasaan" (*power*) kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung. Rappaport mengartikan *empowerment* sebagai suatu cara dimana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar dapat berkuasa atas kehidupannya. Pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian upaya untuk menolong masyarakat agar lebih berdaya dalam meningkatkan sumber daya manusia dan berusaha mengoptimalkan sumber daya tersebut sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya sekaligus dapat meningkatkan kemampuan ekonominya melalui kegiatan-kegiatan swadaya.

*Empowerment* yang dalam bahasa Indonesia berarti pemberdayaan adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan Eropa. Konsep pemberdayaan ditengarai mulai muncul sekitar decade 70-an dan kemudian berkembang terus hingga kini, bersamaan dengan makin merebaknya pemikiran dan aliran posmodernisme. *Empowerment* Eropa modern pada hakikatnya merupakan aksi emansipasi dan liberalisasi manusia dari totaliterisme keagamaan. Emansipasi dan liberalisasi serta penataan terhadap segala kekuasaan dan

penguasaan inilah yang kemudian menjadi substansi pemberdayaan.<sup>5</sup> Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat *people centered*, *participatory*, *empowering*, dan *sustainable*.

## 2. Kesejahteraan Sosial

Dalam undang-undang tentang kesejahteraan sosial pasal 1 yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.<sup>6</sup> Pendefinisian tentang kesejahteraan yang tertuang dalam undang-undang nomor 11 tahun 2009 tersebut menjelaskan bahwa untuk mampu menghadirkan kondisi yang terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan warga negara maka pendidikan menjadi term yang dianggap tepat. Pendidikan tidak hanya membantu meningkatkan kesejahteraan sosial juga memberikan posisi masyarakat pada kasta tertentu.

Pendidikan sebagai term yang cocok dalam peningkatan kehidupan yang sejahtera sesuai dengan yang tertera dalam surat al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi:

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

...niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang yang akan diangkat derajatnya adalah orang-orang yang beriman dan orang yang menuntut ilmu. Esensi dalam menuntut ilmu berarti masuk kedalam term pendidikan.

---

<sup>5</sup> Priyono dan Pranaka dalam Bagong Suyanto, "Pemberdayaan Komunitas Marginal di Perkotaan", *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hal. 169.

<sup>6</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Bab I Ketentuan Umum Pasal 1.

Yose Ortega menyatakan bahwa pendidikan diibaratkan sebuah sekolah, jika masyarakat rusak maka sekolahpun menjadi rusak.<sup>7</sup> Sumber dimana meningkatkan kualitas masyarakat adalah di dalam sekolah atau lebih global lagi di dalam ruang pendidikan. Pemberdayaan masyarakat terutama bagi masyarakat transisi kota menjadi moment yang tepat terutama untuk mendongkrak kehidupan yang lebih sejahtera.

### C. Pemberdayaan Masyarakat sebagai Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Pada tahun 2002, Institute of Development Studies, University of Sussex di Inggris melakukan penelitian terhadap bentuk-bentuk pemerintahan di negara-negara berkembang di seluruh dunia. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa dalam satu dasawarsa belakangan ini sedikitnya ada 63 negara berkembang yang sedang mengalami gelombang perubahan formasi kekuasaan dari pemerintahan sentralistik menuju pada sistem yang lebih dekat dengan warganya. Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang sedang mengalami transformasi kekuasaan seperti itu. Sejak runtuhnya Orde Baru, gelombang reformasi telah mengubah format politik dan sistem pemerintahan di Tanah Air. Kewenangan pemerintahan yang tadinya sangat terpusat di Jakarta kini semakin terdistribusi ke pemerintahan di daerah-daerah melalui proses desentralisasi.<sup>8</sup>

Kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat transisi kota sebagai sebuah strategi membangun kesejahteraan sosial, seharusnya desentralisasi menjadi solusi bagi pemerataan kesejahteraan bagi warga negara. Salah satu contohnya kesejahteraan dalam hal pendidikan seharusnya menjadihal yang mudah untuk dikordinisikan karena system desentralisasi<sup>9</sup> harusnya menjadi lebih dekat. Namun dalam faktanya

---

<sup>7</sup> Zamroni, *Pendidikan dan Demokrasi dalam Transisi: Prakondisi menuju era Globalisasi*, 75.

<sup>8</sup> Edi Suharto, Ph.D dalam <http://www.policy.hu> accessed at 10 November 2015.

<sup>9</sup> Desentralisasi sesungguhnya membawa angin segar bagi tumbuhnya demokrasi dan partisipasi warga dalam segenap aktivitas pembangunan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesetaraan antar golongan, memperluas keadilan sosial dan memperbaiki kualitas kehidupan rakyat banyak. Konsep tentang demokrasi representatif dan partisipatoris, misalnya, lebih mudah diterapkan di tingkat pemerintahan daerah, karena skala kedaerahan dan kedekatannya dengan komunitas lokal. Namun dalam kenyataannya, suara-suara yang terdengar dari realisasi desentralisasi itu seringkali tidak terlalu

hal ini tidak menemukan kebuntuan dengan banyak masyarakat terutama masyarakat transisi kota yang letak dan kondisi secara geografis dekat dengan pemerintahan.

Dari data statistik tingkat provinsi dan kabupaten menunjukkan bahwa terdapat kelompok anak-anak tertentu yang terkena dampak paling rentan yang sebagian besar berasal dari keluarga miskin sehingga tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, memiliki kemungkinan putus sekolah empat kali lebih besar daripada mereka yang berasal dari keluarga berkecukupan. Untuk data statistik geografis, tingkat putus sekolah anak SD di desa 3:1 dibandingkan dengan di daerah perkotaan. Hal tersebut terjadi karena dipicu oleh faktor kekurangan tenaga pengajar untuk daerah terpencil dan tergolong berpenghasilan rendah. Tingkat putus sekolah anak di desa dapat mencapai 3% jika dibandingkan dengan anak di perkotaan. Keadaan seperti ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah dalam pemerataan pendidikan di Indonesia.<sup>10</sup>

Kebanyakan dari masyarakat yang putus sekolah adalah disebabkan karena faktor ekonomi dan lingkungan. Faktor ekonomi disebabkan karena masyarakat tidak mampu membiayai pendidikan anaknya kejenjang yang lebih tinggi. Biasanya anak yang putus sekolah akibat orang tuanya tidak mampu membiayai sekolah terjadi pada transisi ketika anak tamat SD menuju tingkat SMP. Akibatnya anak-anak yang putus sekolah ini memilih memilih menjadi pengamen, pengemis, main-main yang tidak jelas arah perkembangannya. Menurut Retno Listyarti,<sup>11</sup> merujuk data FSGI angka anak putus sekolah terutama terjadi pada anak perempuan di usia 7,7 tahun atau anak yang sudah menginjak bangku SD ke SMP dan hal ini hampir terjadi di sebagian besar

---

memuaskan. Umumnya, argumentasi pesimis menyatakan bahwa desentralisasi hanya memperkuat elit-elit lokal, menyuburkan primordialisme, 'men-daerahkan KKN' dan 'meng-KKN-kan daerah'. Bahkan argumentasi yang lebih pesimis lagi menyatakan bahwa desentralisasi menyulut disintegrasi bangsa. Lihat Edi Suharto, Ph.D dalam <http://www.policy.hu> accessed at 10 November 2015.

<sup>10</sup> Mujtahidien dalam workshop pendidikan gratis, di Jakarta, Selasa (23/6/2015). Baca <http://kabar24.bisnis.com/read/20150623/255/446327/unicef-25-juta-anak-indonesia-putus-sekolah>

<sup>11</sup> Sekretaris Jendral Federasi Serikat Guru Indonesia. Baca <http://news.okezone.com/read/2015/08/17/65/1197407/70-tahun-ri-merdeka-anak-putus-sekolah-masih-tinggi>

provinsi, terutama di daerah tertinggal. Adapun, untuk anak putus sekolah khusus laki-laki di usia 8,1 tahun saat menginjak SMP. Sehingga bisa dikatakan bahwa keadaan status ekonomi keluarga miskin cenderung akan menimbulkan berbagai masalah yang berkaitan dengan pembiayaan hidup anak, khususnya dalam pendidikan anak, sehingga anak sering dilibatkan untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga merasa terbebani dengan masalah ekonomi ini sehingga mengganggu kegiatan belajar dan kesulitan mengikuti pelajaran

Sementara itu, faktor lingkungan sendiri disebabkan karena oleh pengaruh yang disebabkan oleh lingkungan tempat seseorang. Misalnya ketika seseorang tinggal di masyarakat yang mayoritas tidak berpendidikan maka dia akan terpengaruh oleh masyarakat tersebut dan pasti akan terbawa pada budaya tidak peduli pada pendidikan.

Masalah putus sekolah sebagaimana data di atas juga dialami di daerah kecamatan Cipocok, khususnya di desa jatisari kampung Tegal Jeruk Serang. Lokasi Desa Jatisari kampung Tegal Jeruk Kecamatan Cipocok Serang sebenarnya tidak begitu jauh dari wilayah Kota Serang. Jarak desa ini hanya sekitar 2 km berdekatan dengan kantor walikota Serang. Namun berdasarkan data dari kelurahan setempat diketahui bahwa mayoritas penduduk desa ini tergolong ekonomi miskin. Mayoritas penduduk bekerja sebagai buruh kasar. Sebagian penduduk desa ini menjalani profesi sebagai kuli bangunan, sopir angkot, pedagang asongan, karyawan pabrik, dan sebagian ada yang bertani. Keadaan ekonomi yang dialami penduduk desa ini sedikit banyak mempengaruhi tingkat kepedulian untuk menyekolahkan anak mereka kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kebanyakan orang tua lebih sibuk mengurus beban kebutuhan hidup dan kurang memperdulikan kebutuhan pendidikan anak. Bahkan tidak jarang anak-anak ikut membantu orang tuanya mencari tambahan ekonomi keluarga.

Kondisi demikian mengakibatkan minimnya kesadaran dari orang tua untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Berdasarkan pre-

riset ditemukan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran orang tua terhadap pendidikan anaknya. Beberapa faktor tersebut adalah *pertama*, stigma masyarakat yang menganggap bahwa pendidikan itu mahal, *kedua*, pesimisme masyarakat terhadap anak sekolah yang dianggap tidak mampu memperoleh pekerjaan setelah menyelesaikan pendidikan sekolahnya. Ketiga, rendahnya jenjang pendidikan yang dimiliki menjadikannya tidak terbuka dengan pengaruh positif yang dihasilkan oleh pendidikan.

Kemudian dilihat dari faktor lingkungan. Berdasarkan pre-riSET masih dijumpai masyarakat yang belum memiliki kesadaran kolektif tentang bagaimana cara mendidik anak yang baik. Masyarakat menyekolahkan anaknya ke sekolah hanya sekedar mengikuti kebiasaan teman-temannya. Anak-anak tidak diperhatikan bagaimana perkembangan penddidikannya, prestasi apa yang dicapai, dan kebutuhan apa yang perlu dilengkapi untuk pendidikan anak-anaknya. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada disekitar anak baik berupa benda-benda, peristiwa-peristiwa, yang terjadi, maupun kondisi masyarakat lingkungan di mana proses pendidikan berlangsung dan lingkungan di mana anak-anak bergaul setiap hari. Menurut Sartain (ahli psikologi Amerika), sebagaimana dikutip M.Ngalim Purwanto dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Pendidikan Teorotis dan Praktis*, yang dimaksud dengan lingkungan (*environment*) meliputi kondisi dan alam dunia ini yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, perkembangan atau *life processes*.<sup>12</sup>

Berasarkan hasil pengamatan dilihat bahwa kondisi masyarakat di daerah tersebut masih tertinggal baik secara ekonomi, pekerjaan, dan pendidikan. Hal ini dapat dikatakan bahwa indicator kehidupan yang sejahtera belum tercapai. Masyarakat desa ini belum mampu menciptakan kondisi ekonomi yang mapan. Mayoritas masyarakat hanya mengandalkan tenaganya dalam mencari sumber-sumber ekonomi dalam mencukupi penghidupannya. Masyarakat desa ini belum mampu menciptakan peluang sendiri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Factor rendahnya pendidikan

---

<sup>12</sup> M.Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teorotis dan Praktis*, Remaja

menjadi penyebab utama kondisi tersebut.<sup>13</sup>

Hal demikian mengakibatkan anak-anak mengikuti pola dari orang tuanya. Faktor orang tua yang tidak memperdulikan pendidikan pada akhirnya menyebabkan anak-anak kurang berminat melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi. Anak-anak tidak memiliki tujuan dan arah yang jelas mau kemana setelah lulus sekolah dasar. Kemudian juga bagi yang sudah menyelesaikan SMP atau SMA belum mampu menjangkau pekerjaan yang memadai. Dan alasan ini yang membuat anak-anak kurang berminat melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi. Ditambah stigma dari orang tua bahwa sekolah mahal, setelah lulus masih sulit mencari pekerjaan dan akan membebani orang tua.

Program pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan oleh Pusat Pengabdian Masyarakat bekerjasama dengan Rumah Belajar LAKSITA menjadi solusi bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dengan berbasis pendidikan. Program yang diberikan dalam pelatihan adalah pendampingan dan pelatihan *life skill education* bagi para remaja di lingkungan kampung tegal jeruk. Dengan adanya program pendampingan ini menjadi solusi bagi masyarakat dalam menjembatani kesulitan ekonomi. Program ini memberikan keterampilan bagi anak-anak SMP dan SMA supaya memiliki skill di bidang ketrampilan. Kemudian dari hasil program ini para peserta mampu mengaplikasikan dalam mendongkrak kesejahteraan keluarga mereka dan menjadikan kehidupan yang layak.

#### D. Bahan Bacaan

Dewey, John, *Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education*, Delhi: Aakar Books, 2004.

Edi Suharto, Ph.D dalam <http://www.policy.hu> accessed at 10 November 2015.

Fachruddin, Fuad, *Agama dan Pendidikan Demokrasi*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.

---

<sup>13</sup> Observasi dan wawancara dengan beberapa tokoh di desa jati sari kampung tegal jeruk.

- <http://study.com/academy/lesson/what-is-democracy-definition-types-principles.html>  
accessed at 16 November 2015.
- James Curran, "Mass Media and Democracy: A Reappraisal", *Mass Media and Society*, New York: Routledge, 1992.
- Mujtahidien dalam workshop pendidikan gratis, di Jakarta, Selasa (23/6/2015). Baca <http://kabar24.bisnis.com/read/20150623/255/446327/unicef-25-juta-anak-indonesia-putus-sekolah>
- Mustapha Kamal Pasha, "Predatory Globalization and Democracy in the Islamic World", *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 581, Globalization and Democracy (May, 2002), 121-132.
- Sekretaris Jendral Federasi Serikat Guru Indonesia. Baca <http://news.okezone.com/read/2015/08/17/65/1197407/70-tahun-ri-merdeka-anak-putus-sekolah-masih-tinggi>
- Undang-Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2, Surabaya: Indah, 2009.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Bab I Ketentuan Umum Pasal 1.
- Undang-undang Republik Inonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Zamroni, *Pendidikan dan Demokrasi dalam Transisi: Prakondisi menuju era Globalisasi*, Jakarta: PSAP, 2007.